



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) **TAHUN 2022**

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



DINAS PERKEBUNAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Isu Strategis	3
D. Cascading Kinerja	6
E. Peta Proses Bisnis	9
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan	13
B. Sasaran	13
C. Rencana Program	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	32
D. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	35
B. Saran/Rekomendasi	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	
<i>Cascading Kinerja</i> berdasarkan RPJMD 2019-2024 Perubahan	7
Tabel 1.2	
Peta proses bisnis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	9
Tabel 2.1	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3.1	
Realisasi dan Capaian Target Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir (2019-2022)	19
Tabel 3.2	
PDRB Sub Kategori Perkebunan Tahun 2021 dan 2022	23
Tabel 3.3	
Luas Areal dan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022	22
Tabel 3.4	
Rekap Bantuan Hibah Komoditi Tembakau yang bersumber dari DBHCHT	27
Tabel 3.5	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
Tabel 3.6	
Alokasi Anggaran Sasaran Pembangunan	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Bidang Produksi Tanaman Semusim, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Produksi Tanaman Tahunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

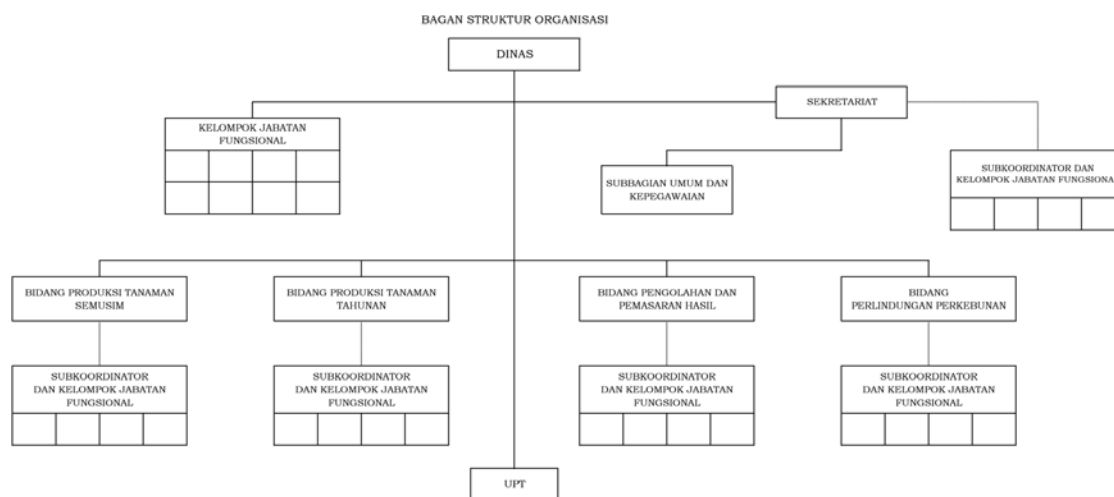
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub

bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sedangkan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 2 (Dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni:

1. UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
dan
2. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 tahun 2021:



B. Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang termuat di dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan tugas pembantuan. Selanjutnya, di dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa di dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

Pembangunan sub kategori perkebunan di Jawa Timur tidak terlepas dari isu-isu strategis yang membutuhkan perhatian secara khusus dalam penanganannya. Secara garis besar, isu-isu strategis seputar pembangunan sub kategori perkebunan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang masih rendah. Secara teknis, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni:

a. Ketersediaan bibit unggul

Pada tahap ini, dibutuhkan benih dan bibit yang berkualitas unggul yang didukung dengan pemanfaatan teknologi budidaya yang tepat guna. Atas dasar itulah, maka ketersediaan benih perkebunan yang berkualitas unggul menjadi suatu hal yang penting dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan, yang kemudian bermuara kepada meningkatnya mutu dan nilai tambah produk perkebunan.

b. Ketersediaan pupuk

Ketersediaan pupuk tepat pada waktunya turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, namun demikian, penggunaan pupuk tetap harus memperhatikan bahan organik dan keberlanjutan pemanfaatan atas tanah/lahan, sehingga keseimbangan ekologi akan tetap terjaga.

c. Teknik budidaya

Teknik budidaya yang sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) merupakan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis. Teknik budidaya tanaman perkebunan harus memperhatikan jenis komoditi, jenis tanah, serta iklim dan curah hujan.

d. Masih terbatasnya prasarana dan sarana perkebunan

Dalam rangka peningkatan produksi dan nilai tambah produk perkebunan, maka diperlukan dukungan prasarana dan sarana yang memadai. Prasarana dan sarana

dimaksud ialah ketersediaan alat/mesin pertanian, alat alat pengolahan pasca panen, sampai dengan alat pengolahan hasil.

- e. Masih tingginya serangan hama penyakit tanaman perkebunan

Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan dilakukan sebagai dukungan terhadap peningkatan produksi tanaman perkebunan. Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan dimaksudkan untuk meminimalisir angka kehilangan produksi sebagai akibat dari serangan hama/penyakit. Pada saat ini, beberapa jenis hama dan penyakit, masih menyerang tanaman perkebunan dengan intensitas tinggi, antara lain: Hama kwang wung (*Oryctes rhinoceros*) pada Kelapa, yang banyak mengakibatkan kematian tanaman dan dapat memicu potensi kehilangan produksi hingga 26 %; hama penggerek buah (*Conomorpha cramerella*), penyakit busuk buah (*Phytophthora sp*), kepik buah (*Helopeltis sp*) pada Kakao yang dapat menyebabkan potensi kehilangan produksi hingga 10-30 %, Penggerek buah Kopi (*Hypotenemus hampai*) yang berpotensi menghilangkan produksi hingga 20 %.

- f. Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan, selain dengan meningkatkan kemampuan

petani pada sektor pengolahan hasil, yang tidak kalah pentingnya ialah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani terhadap akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan. Tidak jarang kelompok tani yang telah memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengolah produk perkebunan menjadi produk olahan, mengalami kesulitan dalam sektor pemasaran, selain itu ada pula petani yang telah memiliki akses pasar, namun mengalami kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi karena keterbatasan modal.

D. Cascading Kinerja

Program dan kegiatan pada tahun 2022 telah diadakan penyesuaian terhadap Renstra 2019-2024 perubahan dengan mengacu kepada RPJMD 2019-2024 perubahan. Perubahan nomenklatur program kegiatan yang tertuang di dalam Renstra 2019-2024 perubahan adalah hasil dari penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun *Cascading* Kinerja berdasarkan RPJMD 2019-2024 perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Cascading Kinerja berdasarkan RPJMD 2019-2024 Perubahan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	Meningkatkan nilai tambah produksi tanaman perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHK)	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program Dinas Perkebunan yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran Dinas Perkebunan 3. Indeks profesionalitas ASN 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Predikat Penilaian Implementasi SAKIP
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan 2. Persentase peningkatan benih bersertifikat 3. Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan 4. Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
						5. Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang difasilitasi pengolahan hasil
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana on farm 2. Jumlah luas budidaya tanaman perkebunan 3. Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana off farm 4. Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana pengolahan hasil
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan 2. Jumlah benih yang diedarkan 3. Jumlah pengawasan mutu benih tanaman perkebunan
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase capaian peningkatan kelas kelompok
					Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang terfasilitasi prasarana perkebunan
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase pengamanan potensi kehilangan produksi tanaman perkebunan
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luas pengendalian 2. Jumlah luas penanggulangan bencana lahan perkebunan
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis yang diberikan
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rekomendasi teknis pengembangan usaha perkebunan 2. Jumlah sertifikat standarisasi produk perkebunan sesuai SNI
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani terakses informasi teknologi Pertanian
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

E. Peta Proses Bisnis

Tabel 1.2

Peta proses bisnis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
P.1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	P.1.4	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	P.1.4.5	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	P.1.4.5.1	Ketersediaan Benih Berkualitas	P.1.4.5.1.1	Penyediaan Benih	P.1.4.5.1.1.1	Optimalisasi pemanfaatan Kebun Sumber Benih Dinas
										P.1.4.5.1.1.2	Pembinaan Penangkar/Produsen Benih
										P.1.4.5.1.1.3	Fasilitasi pengembangan benih unggul
								P.1.4.5.1.2	Sertifikasi Benih	P.1.4.5.1.2.1	Uji Laboratorium
										P.1.4.5.1.2.2	Uji Lapang
										P.1.4.5.1.2.3	Uji Kelayakan calon penangkar/produsen benih
								P.1.4.5.1.3	Pengawasan Peredaran Benih	P.1.4.5.1.3.1	Pelabelan Benih Bersertifikat
										P.1.4.5.1.3.2	Pengawasan Peredaran Benih
										P.1.4.5.1.3.3	Evaluasi kelayakan penangkar/produsen benih
						P.1.4.5.2	Teknik Budidaya Tanaman	P.1.4.5.2.1	Penerapan Budidaya <i>on farm</i>	P.1.4.5.2.1.1	Ekstensifikasi

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
										P.1.4.5.2.1.2	Rehabilitasi
										P.1.4.5.2.1.3	Intensifikasi
										P.1.4.5.2.1.4	Diversifikasi
										P.1.4.5.2.1.5	Peningkatan SDM Budidaya on farm
								P.1.4.5.2.2	Penanganan <i>off farm</i>	P.1.4.5.2.2.1	Peningkatan SDM penanganan panen dan pasca panen
										P.1.4.5.2.2.2	Pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen
								P.1.4.5.2.3	Perlindungan Tanaman Perkebunan	P.1.4.5.2.3.1	Peningkatan SDM Pengendalian OPT
										P.1.4.5.2.3.2	Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Organisme Penggangu Tumbuhan) Tahunan Perkebunan
										P.1.4.5.2.3.3	Konservasi Lahan Perkebunan
										P.1.4.5.2.3.4	Pendampingan Penanganan Pasca Bencana dan Gangguan Usaha Perkebunan
										P.1.4.5.2.3.5	Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Organisme Penggangu Tumbuhan) Semusim Perkebunan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
						P.1.4.5.3	Pengembangan Usaha dan Hilirisasi Produk Tanaman Perkebunan	P.1.4.5.3.1	Pemanfaatan prasarana dan sarana Pengolahan Hasil	P.1.4.5.3.1.1	Peningkatan SDM Pengolahan hasil
										P.1.4.5.3.1.2	Pemanfaatan teknologi pengolahan hasil
										P.1.4.5.3.1.3	Pembinaan dan pendampingan Standarisasi Mutu Produk
								P.1.4.5.3.3	Aksesibilitas terhadap Pasar	P.1.4.5.3.3.1	Fasilitasi jaringan kemitraan
										P.1.4.5.3.3.2	Fasilitasi Permodalan
								P.1.4.5.3.4	Penguatan Kelembagaan	P.1.4.5.3.4.1	Peningkatan SDM Manajerial Kelompok Tani
										P.1.4.5.3.4.2	Rintisan Korporasi Petani
								P.1.4.5.3.5	Pembinaan Perkebunan Besar	P.1.4.5.3.5.1	Rekomendasi Teknis Perkebunan Besar
										P.1.4.5.3.5.2	Pendampingan Teknis Perkebunan Besar

F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2022, didapatkan beberapa uraian singkat atas hasil evaluasi, yakni sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur berhasil meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan dari manajemen perubahan;
2. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan upaya perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja ke seluruh ASN di semua level, namun belum ada keselarasan antar dokumen perencanaan karena kurangnya konsistensi pada indikator kinerja;
4. Penyusunan dokumen perencanaan belum memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik, yaitu penentuan target yang kurang *measurable* dan *attainable* pada kriteria SMART.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan periode tahun 2019-2024, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatkan nilai tambah produksi tanaman perkebunan” dengan indikator tujuan “Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHK)”

B. Sasaran

Untuk mendukung tercapainya tujuan sebagaimana yang telah disebut di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, menetapkan Sasaran sebagai berikut:

“Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan” dengan indikator “Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)”

C. Rencana Program

Program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu kepada Program prioritas yang tercantum pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur. Adapun program dan ruang lingkup kegiatan yang direncanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini merupakan Program penunjang yang mencakup urusan kesekretariatan Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat beberapa komponen penunjang lainnya. Komponen penunjang dimaksud, meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan asset, prasarana dan sarana aparatur, serta pelaporan. Adapun program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
dan
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini merupakan manifestasi dari langkah strategis yang harus ditempuh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Secara teknis, produksi dan

produktivitas tanaman perkebunan dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni:

a. Ketersediaan benih unggul

Menjamin ketersediaan benih unggul dengan mengoptimalkan fungsi kebun dinas, serta memberikan pembinaan kepada penangkar dan produsen benih untuk menggunakan standar baku teknis perbenihan sesuai dengan GAP. Untuk menjamin kualitas benih yang sudah diproduksi, diadakan uji lapang dan uji laboratorium untuk kemudian diterbitkan sertifikat benih apabila dari hasil uji tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat benih.

b. Ketersediaan pupuk

Ketersediaan pupuk tepat pada waktunya turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, namun demikian, penggunaan pupuk tetap harus memperhatikan bahan organik dan keberlanjutan pemanfaatan atas tanah/lahan, sehingga keseimbangan ekologi akan tetap terjaga.

c. Teknik budidaya

Teknik budidaya yang sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) merupakan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis budidaya tanaman perkebunan. Teknik budidaya tanaman perkebunan harus memperhatikan jenis komoditi, jenis tanah, serta iklim dan curah hujan.

Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;
- b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman.

3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Di dalam program ini mengkomodir kegiatan yang erat kaitannya dengan prasarana perkebunan yang terdiri dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM pada sektor hilir, serta aksesibilitas terhadap pasar komoditi perkebunan. Adapun program ini didukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, selain benih, pupuk, dan teknik budidaya seperti yang telah diulas terdahulu, yang tidak kalah pentingnya ialah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan konservasi. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang kurang tepat, dapat menurunkan angka produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara signifikan, oleh karena itu dibutuhkan langkah yang tepat dan akurat dalam menanggulangi gangguan dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan secara lebih terukur dan terstruktur.

Selain gangguan dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan, potensi masalah lainnya ialah lahan tanaman perkebunan yang rawan terdampak bencana alam, seperti tanah longsor, eskavasi tanah, banjir, dan lain-lain yang butuh penanganan dalam bentuk konservasi lahan. Konservasi tanaman juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kelestarian benih induk yang memiliki spesifik lokasi, yang tentunya tidak mudah untuk dikembangkan di lokasi lain.

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah jawaban untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program Perizinan Usaha Pertanian merupakan program yang dikhususkan kepada fasilitasi perizinan usaha lingkup sub kategori perkebunan dalam bentuk penerbitan rekomendasi sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sub kategori perkebunan untuk mengurus perizinan di lembaga atau instansi lain yang berwenang menerbitkan izin sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan. Adapun program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian merupakan program yang diproyeksikan untuk memfasilitasi peningkatan SDM petani perkebunan melalui kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yakni:

- a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
- b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	1,5 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Di dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2019-2024, telah ditetapkan sasaran strategis, yakni “Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan” dengan indikator “Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)”. Realisasi dan capaian dalam 4 tahun terakhir dari Sasaran Strategis tersebut, dapat dijabarkan sebagaimana di dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Realisasi dan Capaian Target Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir (2019-2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	2019	1,5 %	4,65 %	310,01
			2020	1,5 %	4,15 %	276,60
			2021	1,5 %	6,82 %	454,91
			2022	1,5 %	4,03 %	268,93

Pada tahun 2019, PDRB sub kategori perkebunan mengalami kenaikan yang cukup tajam. Dari -3,22 pada tahun 2018 naik menjadi 4,65 pada tahun 2019. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya animo petani untuk membudidayakan komoditi perkebunan setelah mengalami banyak kerugian akibat gagal panen pada tahun sebelumnya. Banyak petani yang memiliki keyakinan bahwa setelah musim panen yang merugi, musim panen berikutnya pasti hasil

panennya melimpah dan harga jualnya cukup menggiurkan. Inilah yang menyebabkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan luas areal dan produksi di hampir seluruh komoditi tanaman perkebunan, khususnya komoditi tanaman semusim, yakni Tebu dan Tembakau.

Secara grafik, pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019. tahun 2020 lebih disebabkan karena adanya pandemi virus *Covid-19* yang tidak hanya berdampak kepada komoditi tanaman semusim perkebunan seperti Tebu dan Tembakau, namun juga berdampak ke hampir seluruh komoditi perkebunan. Adanya pemberlakuan kebijakan PSBB dan PPKM selama hampir di sepanjang tahun 2020, menjadi penyebab terganggunya mobilitas orang dan barang di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebab lainnya ialah karena permintaan konsumsi produk komoditi perkebunan mengalami penurunan dan sebagian besar komoditi tanaman perkebunan mengalami gangguan distribusi.

Di tahun 2021, pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan kembali melonjak ke angka 6,82. Lonjakan ini disebabkan karena mulai normalnya aktifitas masyarakat pasca pembatasan aktifitas pada tahun 2020. Petani sudah mulai memiliki harapan baru setelah mengalami kerugian di tahun 2020. Aktifitas distribusi sudah berangsur-angsur menuju normal seperti sebelum pandemi. Lonjakan angka PDRB juga diikuti dengan meningkatnya produksi hampir di seluruh komoditi perkebunan. Angin segar ini menunjukkan bahwa adanya pandemi yang

melanda pada sepanjang tahun 2020 yang lalu, tidak berpengaruh banyak terhadap animo petani untuk membudidayakan tanaman perkebunan.

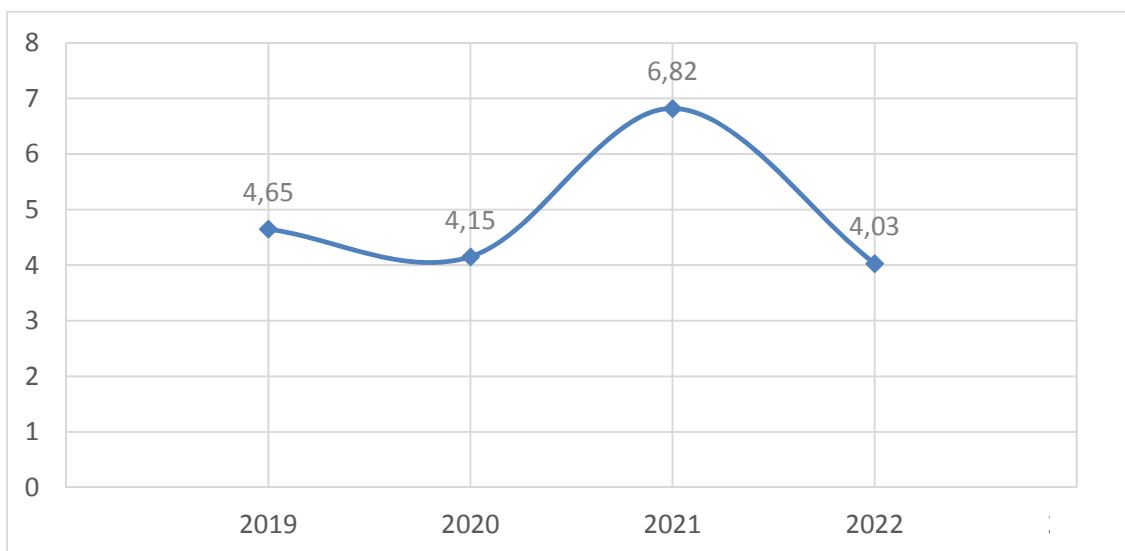
Ketika animo petani perkebunan untuk membudidayakan tanaman perkebunan sudah kembali tinggi, cobaan kembali menerpa sub sektor perkebunan. Diawali dengan naiknya harga pupuk di awal tahun 2022, sebagai akibat dari pasokan gas yang terbatas, sehingga proses produksi pupuk menjadi terhambat, yang kemudian berdampak kepada stok ketersediaan pupuk yang semakin terbatas. Eskalasi militer yang terjadi di Ukraina, menjadikan pasokan gas ke beberapa negara menjadi terganggu, dan berimbas pula terhadap pasokan pupuk dalam negeri.

Di tahun 2022 juga terjadi anomali iklim kemarau basah, yang menyebabkan hujan sepanjang tahun. Kondisi ini berdampak kepada tumbuh kembang tanaman perkebunan, terutama komoditi tanaman semusim. Intensitas dan curah hujan yang cukup tinggi di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, tak terkecuali wilayah sentra Tembakau, yang berdampak kepada turunnya produksi Tembakau. Bahkan banyak petani Tembakau yang mengalami gagal panen karena lahannya terendam oleh banjir. Salah satu kabupaten sentra Tembakau yang mengalami gagal panen adalah kabupaten Tulungagung. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, lahan Tembakau yang terdampak banjir pada bulan Oktober 2022 kemarin seluas 1.226 ha, dan yang mengalami gagal panen seluas 1.088 ha.

Tidak hanya Tembakau, hampir semua komoditi tanaman perkebunan mengalami penurunan angka produksi. Meskipun demikian, nilai PDRB sub kategori perkebunan justru tetap mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan nilai PDRB sub kategori perkebunan pada tahun 2022, tidak lepas dari meningkatnya produksi tanaman Tebu. Tanaman yang termasuk ke dalam tanaman semusim ini mengalami peningkatan luas areal dan produksi pada tahun 2022 kemarin bila dibandingkan dengan tahun 2021 (lihat tabel 3.4).

Pada tahun 2021, luas areal tanaman Tebu mencapai 193.515 ha dan produksinya sebesar 1.085.865 ton (Gula Kristal Putih). Pada tahun 2022 kemarin, luas areal tanaman Tebu mengalami peningkatan menjadi 219.211 ha atau meningkat sebesar 13,28 %, sedangkan produksinya mencapai 1.192.034 ton (Gula Kristal Putih) atau meningkat sebesar 9,77 %. Meningkatnya produksi tanaman Tebu inilah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan nilai PDRB sub kategori perkebunan di Jawa Timur pada tahun 2022. Berikut grafik pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan selama 4 tahun terakhir (2019-2022):

Pertumbuhan PDRB sub kategori Perkebunan (ADHB) periode tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.2
PDRB Sub Kategori Perkebunan Tahun 2021 dan 2022

Rincian	Satuan	2021					2022				
		Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Total	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Total
ADHB	Miliar Rp	4,715.65	11,506.71	17,122.55	9,055.88	42,400.80	5,190.72	12,238.76	17,898.42	8,783.30	44,111.20
ADHK (2010=100)	Miliar Rp	3,065.28	7,370.22	10,928.55	5,728.43	27,092.49	3,139.16	7,406.43	11,061.59	5,410.10	27,017.28
pertumbuhan ADHB	Persen	9.85	5.61	8.92	3.10	6.82	10.07	6.36	4.53	-3.01	4.03
Kontribusi	Persen	0.80	1.90	2.74	1.43	1.73	0.80	1.80	2.55	1.26	1.62
Pertumbuhan yoy	Persen	3.48	0.51	2.75	-2.63	1.04	2.41	0.49	1.22	-5.56	-0.28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan dengan Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 mencapai angka 4,03 % dari angka pertumbuhan yang ditargetkan sebesar 1,5 %. Pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan tahun 2022, apabila dibandingkan dengan tahun n-1 (2021) mengalami penurunan. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan mencapai angka sebesar 6,82 %, sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan

PDRB sub kategori perkebunan mencapai angka 4,03 %. Bila dilihat dari nilai PDRB, maka terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021 nilai PDRB sub kategori perkebunan sebesar Rp. 42.400.800.000.000,- dan meningkat menjadi Rp. 44.111.200.000.000,- pada tahun 2022 (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.3
Luas Areal dan Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022

No	Komoditi	2021		2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
I. Tanaman Semusim					
1	Tebu : - Gula Kristal	193,515	1,085,865	219,211	1,192,034
2	Tembakau	108,829	118,603	88,962	97,936
II. Tanaman Tahunan					
3	Kopi	113,329	69,632	113,148	68,916
	- Arabika	28,020	14,585	28,124	14,204
	- Robusta	85,309	55,047	85,024	54,712
4	Kakao	55,430	34,703	54,210	33,002

Sumber: data statistik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

TEBU

Pada tahun 2021, luas areal tanaman Tebu mencapai 193.515 ha dan produksinya sebesar 1.085.865 ton (Gula Kristal Putih). Pada tahun 2022 kemarin, luas areal tanaman Tebu mengalami peningkatan menjadi 219.211 ha atau meningkat sebesar 13,28 %, sedangkan produksinya mencapai 1.192.034 ton (Gula Kristal Putih) atau meningkat sebesar 9,77 %. Untuk mendukung peningkatan produksi Tebu pada tahun 2022 kemarin, telah dilaksanakan berbagai kegiatan

yang ditujukan kepada kelompok tani Tebu di sejumlah kabupaten sentra tanaman Tebu, di antaranya ialah:

1. Intensifikasi; yakni penyaluran bantuan hibah pupuk untuk lahan seluas 250 hektar di Kabupaten Tulungagung, Malang, Gresik, Bojonegoro, Probolinggo, dan Kota Malang;
2. Fasilitasi alsintan; yakni penyaluran bantuan alsintan untuk komoditi Tebu berupa Pompa Air sejumlah 10 unit di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Madiun, dan Probolinggo, serta 1 unit hand tractor di Kabupaten Lamongan;
3. Pelatihan budidaya tanaman Tebu; yakni kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan SDM petani Tebu, kaitannya dengan teknik budidaya tanaman Tebu yang sesuai dengan *Good Agricultural Practices (GAP)*. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). Kegiatan pelatihan ini menyasar sejumlah petani Tebu di Kabupaten Bondowoso (5 kelompok), Jember (1 kelompok), Blitar (13 kelompok), dan Lumajang (11 kelompok).

TEBAKAU

Sebagaimana tabel di atas, komoditi tanaman perkebunan yang mengalami penurunan produksi secara signifikan adalah tanaman Tembakau. Pada tahun 2021, luas areal tanaman Tembakau seluas 108.829 ha dan produksi sebesar 118.603 ton, sedangkan pada tahun 2022 luas areal tanaman Tembakau mengalami penurunan menjadi seluas 88.962 ha atau menurun sebesar 18,26 % dan produksinya juga

mengalami penurunan menjadi sebesar 97.936 ton atau turun sebesar 17,43 %. Menurunnya luas areal dan produksi komoditi Tembakau di Jawa Timur pada tahun 2022 kemarin, disebabkan karena musim kemarau basah yang membuat sebagian besar Kabupaten sentra Tembakau mengalami penurunan hasil panen atau bahkan mengalami gagal panen karena lahan yang ditanami Tembakau terendam oleh banjir. Gagal panen yang dialami oleh sejumlah petani Tembakau tidak hanya karena lahan Tembakau terendam oleh banjir, namun juga disebabkan karena gagal menanam Tembakau. Kejadian gagal menanam Tembakau ini disebabkan karena adanya intensitas hujan yang tinggi, menjadikan tanaman Tembakau banyak yang mati. Kondisi tersebut, oleh petani diupayakan untuk menyulam tanaman yang mati dengan tanaman baru, namun karena kembali terkena guyuran air hujan, sehingga mengakibatkan tanaman sulaman juga mati. Berulang kali menyulam tanaman dilakukan oleh petani, namun tetap saja tanaman Tembakau tidak bisa tumbuh dengan normal bahkan tetap banyak yang mati. Hal inilah kemudian menjadikan sejumlah petani tidak lagi meneruskan untuk budidaya tanaman Tembakau, sehingga hal inilah kemudian menjadikan petani gagal menanam Tembakau.

Dalam hal mendukung upaya peningkatan produksi tanaman Tembakau, melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 kemarin, telah melaksanakan berbagai macam penyaluran bantuan bagi petani Tembakau. Untuk bantuan pupuk, lebih dari 1.700 ton pupuk NPK dan

KNO₃ yang telah disalurkan ke petani Tembakau sejumlah 465 kelompok tani yang tersebar di seluruh Kabupaten sentra Tembakau se Jawa Timur (lihat tabel 3.4).

Selain penyaluran bantuan pupuk, pada tahun 2022 juga dialokasikan sejumlah bantuan hibah dukungan sarana usaha tani Tembakau, yang meliputi alat *on farm* sampai dengan alat pengolahan panen dan pasca panen (lihat tabel 3.4).

Tabel 3.4

Rekap Bantuan Hibah Komoditi Tembakau yang bersumber dari DBHCHT

No	Jenis Hibah	Jumlah Kelompok Tani	Volume
I	Hibah Barang		
A	<i>Pengawasan Sebaran Pupuk</i>		
1	Pupuk NPK Tembakau	427	1.644.600 kg
2	Pupuk KNO ₃	38	100.000 kg
B	<i>Dukungan Sarana Prasarana Usaha Tani Tembakau</i>		
1	Pompa Air	44	44 buah
2	Mesin Perajang	10	10 unit
3	Tikar	12	1.740 buah
4	Widik	11	2.050 lembar
5	Generator	24	24 unit
6	Cultivator	78	78 unit
7	Handtraktor	174	174 unit
8	Tandon Air	12	317 buah
9	Timbangan Digital	19	19 buah
10	Para-Para	4	194 buah
11	Terpal	68	1.779 lembar

KOPI

Seperti halnya dengan komoditi tanaman Tembakau, komoditi tanaman perkebunan lainnya juga mengalami penurunan produksi pada tahun 2022 kemarin. Sebut saja Kopi, yang mengalami

penurunan produksi bila dibandingkan dengan tahun 2021. Produksi Kopi pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 69.632 ton, sedangkan pada tahun 2022, produksi Kopi mengalami penurunan sebesar 1,03 % menjadi 68.916 ton. Turunnya angka produksi Kopi lebih disebabkan karena pada saat memasuki fase pembungaan, terjadi intensitas dan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan banyak bunga yang mengalami keguguran yang kemudian berdampak kepada terhambatnya proses pembuahan. Untuk mendukung peningkatan produksi Kopi pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1. Pengembangan, terdapat alokasi bantuan hibah bibit Kopi Arabika untuk lahan seluas 75 hektar di Kabupaten Malang (20 ha), Pacitan (10 ha), Ponorogo (10 ha), Probolinggo (15 ha), Trenggalek (10 ha), dan Mojokerto (10 ha);
2. Rehabilitasi, terdapat alokasi bantuan hibah bibit Kopi Robusta untuk lahan seluas 25 hektar di Kabupaten Blitar (7,5 ha), Malang (15 ha), dan Nganjuk (2,5 ha);
3. Intensifikasi, terdapat alokasi bantuan hibah pupuk NPK untuk lahan seluas 50 ha di Kabupaten Pacitan (10 ha), Malang (20 ha), Ngawi (10 ha), dan Lumajang (10 ha);
4. Alat budidaya, terdapat alokasi bantuan hibah alat pemotong rumput sejumlah 10 buah di Kabupaten Malang (2 poktan masing-masing 2 buah), Lumajang (2 poktan masing-masing 2 buah), dan Ponorogo (1 poktan 2 buah);

5. Alat penanganan panen dan pasca panen, terdapat alokasi bantuan hibah alat Huller 1 unit dan Pulper 1 unit untuk 1 poktan di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan 1 unit Huller untuk 1 poktan di Kabupaten Malang.

KAKAO

Hampir sama dengan Kopi, tahun 2022 Kakao juga mengalami penurunan produksi. Bila pada tahun 2021 produksi Kakao sebesar 34.703 ton, maka pada tahun 2022 produksi Kakao mengalami penurunan menjadi 33.002 ton, atau turun sebesar 4,9 %. Turunnya angka produksi Kakao juga disebabkan oleh musim kemarau basah yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Intensitas dan curah hujan yang cukup tinggi berakibat kepada meningkatnya tingkat kelembaban dan terbatasnya pancaran sinar matahari terhadap tanaman Kakao. Hal ini yang menyebabkan banyak bakal buah Kakao mengalami kerontokan dan busuk buah. Untuk mendukung peningkatan produksi Kakao pada tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

1. Pengembangan, terdapat alokasi bantuan hibah bibit Kakao untuk lahan seluas 70 hektar di Kabupaten Trenggalek (20 ha), Madiun (30 ha), dan Malang (20 ha);
2. Rehabilitasi, terdapat alokasi bantuan hibah bibit Kakao untuk lahan seluas 35 hektar di Kabupaten Madiun (20 ha), dan Malang (15 ha);
3. Intensifikasi, terdapat alokasi bantuan hibah pupuk NPK untuk lahan seluas 15 ha di Kabupaten Madiun;

4. Alat penanganan panen dan pasca panen, terdapat alokasi bantuan hibah alat kotak fermentasi sebanyak 40 buah di Kabupaten Trenggalek 20 buah, dan Pacitan 20 buah.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	268,93	95,07	173,86

Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, alokasi anggaran tidak lagi didasarkan kepada besaran kebutuhan belanja, namun lebih kepada pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien untuk menghasilkan output yang efektif mewujudkan tercapainya target indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga yang menjadi tolok ukur keberhasilannya ialah bagaimana target indikator sasaran dapat terpenuhi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien. Yang menjadi kata kunci dalam melihat tingkat efisiensi sumber daya di sebuah organisasi adalah efektif dan efisien, efektif dalam mencapai target indikator sasaran, dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Terdapat beberapa metode pengukuran tingkat efisiensi sumber daya bagi sebuah organisasi yang bisa didapatkan dari berbagai macam literasi, namun metode yang digunakan

di dalam mengukur tingkat efisiensi sumber daya di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ialah dengan menggunakan metode **Analisis Rasio**. Dalam metode pengukuran efisiensi analisis rasio, efisiensi didefinisikan sebagai jumlah unit keluaran per unit masukan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Keluaran}}{\text{Masukan}}$$

Rumus di atas apabila digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi sumber daya di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{\text{Keluaran}}{\text{Masukan}} \\ \text{Efisiensi} &= \frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Serapan Anggaran}} \\ \text{Efisiensi} &= \frac{268,93}{95,07} \\ \text{Efisiensi} &= 2,83\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tingkat efisiensi dengan menggunakan metode analisis rasio di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, cukup tinggi. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang capaian target indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa penggunaan sumber daya secara efisien dapat mendukung capaian target indikator sasaran secara

lebih optimal, dengan tanpa mengurangi tingkat efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

APBD Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp 100,671,880,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 95,704,962,062.00 atau sebesar 95.07 %, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pagu = Rp 27,736,626,925.00
Realisasi = Rp. 25,921,890,882.00
Capaian = 93.46 %
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Pagu = Rp 56,694,292,418.00
Realisasi = Rp. 54,206,356,507.00
Capaian = 95.61 %
- c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pagu = Rp 2,908,910,500.00
Realisasi = Rp. 2,877,318,964.00
Capaian = 98.91 %
- d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pagu = Rp 5,827,145,000.00
Realisasi = Rp. 5,666,815,490.00
Capaian = 97.25 %
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
Pagu = Rp 650,350,000.00
Realisasi = Rp. 633,527,795.00
Capaian = 97.41 %
- f. Program Penyuluhan Pertanian
Pagu = Rp 6,854,555,157.00
Realisasi = Rp. 6,399,052,424.00
Capaian = 93.35 %

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%Anggaran
1.	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	72.935.253.075	72,45

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur telah menyusun Proses Bisnis yang selanjutnya dijabarkan di dalam *cascading* kinerja. Dari proses bisnis tersebut kemudian diadakan penyesuaian terhadap nomenklatur, susunan organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing level lengkap dengan indikator kinerja yang terukur. Pasca implementasi penyederhanaan birokrasi, yang menghapus sebagian jabatan struktural untuk digantikan dengan jabatan fungsional, mengharuskan adanya perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur menjadi Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Inti dari perubahan Pergub tersebut lebih kepada perubahan pada struktur organisasi yang menghapus sebagian struktur seksi dan sub bagian digantikan menjadi sub substansi dan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian digantikan oleh Sub Koordinator yang dijabat oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan.

Untuk indikator kinerja tidak ada perubahan, karena indikator kinerja dari masing-masing level telah disesuaikan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama, begitu pula dengan *cascading* kinerja yang telah diselaraskan dengan sasaran masing-masing level demi tercapainya sasaran strategis.

Terhadap realisasi dan capaian target indikator kinerja, dilakukan evaluasi berkala yang dilaksanakan setiap akhir triwulan dengan berbasis capaian kinerja dari masing-masing indikator, merupakan upaya untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam evaluasi berkala tersebut, dilakukan identifikasi permasalahan untuk kemudian dirumuskan upaya solusi pemecahannya secara cepat, tepat, cermat, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul dapat teridentifikasi sejak dini, serta dapat segera dirumuskan alternatif-alternatif solusi pemecahannya, sehingga diharapkan tidak mempengaruhi realisasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan besaran target indikator yang telah ditetapkan. Selain dilakukan evaluasi kinerja di setiap akhir triwulan, diadakan pula monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Setiap Bidang dan UPT diharuskan untuk mengunggah realisasi dan capaian program dan kegiatan pada tautan yang telah disiapkan di setiap akhir bulan. Realisasi dan capaian yang diunggah, meliputi keuangan dan fisik, sehingga kinerja dari masing-masing bidang dan UPT dapat terpantau dengan seksama.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang efektif agar pelaksanaan pembangunan perkebunan sesuai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2022 untuk mencapai sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur terealisasi sebagai berikut:

- a. Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan dengan Angka Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022, grafiknya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 PDRB (ADHB) sub kategori perkebunan berada di angka 6,82 dan turun menjadi 4,03 pada tahun 2022;
- b. Bila dilihat dari nilai PDRB, terjadi kenaikan di tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai PDRB pada tahun 2021 sebesar Rp. 42.400.800.000.000,- meningkat menjadi Rp. 44.111.200.000.000 di tahun 2022. Peningkatan nilai PDRB tersebut banyak dipengaruhi oleh meningkatnya produksi Tebu, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan.

B. Saran/Rekomendasi

Saran dan rekomendasi untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perkebunan di Jawa Timur ialah dengan meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani perkebunan dalam hal antisipasi terhadap perubahan iklim, baik berupa inovasi teknis budidaya maupun penggunaan varietas tertentu yang tahan terhadap pengaruh perubahan iklim. Berikutnya ialah dengan mendorong petani dan kelompok tani agar berani berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan di tengah persaingan global.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang kami susun sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CASCADING PERUBAHAN RPJMD DINAS PERKEBUNAN

Tujuan	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan	Indikator	Indikator	target 2020	target 2021	target 2022	target 2023	target 2024	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024			
Tujuan – 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Meningkatkan pertumbuhan produksi dan produktivitas serta nilai tambah tanaman perkebunan	- Penerapan Budidaya Tanaman Perkebunan sesuai GAP - Bantuan sarana dan prasarana - Pengembangan tanaman (perluasan, intensifikasi) - Inovasi dan Adopsi teknologi - Menyediakan benih tanaman perkebunan - Pengawasan peredaran benih perkebunan bersertifikat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pangan	Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan	persentase %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25.887.704.000	27.182.089.200	28.541.193.660	29.968.253.343			
						Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan	persentase %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5							
						Persentase peningkatan benih bersertifikat	persentase %	2	2	2	2	2							
						Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan	persentase %	1	2	2	2	2							
						Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang difasilitasi pengolahan hasil	persentase %	100	100	100	100	100							
						- Melakukan pembinaan dan penguatan kelompok tani - Pengembangan Inovasi dan Adopsi teknologi pengolahan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pangan	Persentase capaian peningkatan kelas kelompok	persentase %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600.000.000	630.000.000	661.500.000	694.575.000
						Pengendalian Gangguan Komoditas Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pangan	Rata-rata persentase pengamanan potensi kehilangan produksi tanaman perkebunan	persentase %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1.876.250.000	1.970.062.500	2.068.565.625	2.171.993.906
		- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Perkebunan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pertanian	Persentase rekomendasi teknis yang diberikan	persentase %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	874.888.000	918.632.400	964.564.020	1.012.792.221				



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. HERU SUSENO, M.T

Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

selaku atasan dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, Januari 2022

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. HERU SUSENO, M.T

Pembina Tk. I/IV-b

NIP. 19680530 199503 1 003



Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR



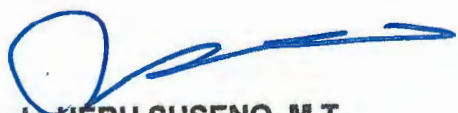
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**DINAS PERKEBUNAN****PROVINSI JAWA TIMUR**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	1.5

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	30,346,313,000	APBD
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	43,954,133,500	APBD & DBHCHT
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	3,090,693,500	APBD
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	5,538,145,000	APBD & DBHCHT
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	637,942,000	APBD
6	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PSP)	Rp	681,000,000	APBN
7	Program Dukungan Manajemen (PSP)	Rp	570,560,000	APBN
8	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Bun: 59180)	Rp	6,007,707,000	APBN
9	Program Dukungan Manajemen (TP Bun: 59180)	Rp	1,540,500,000	APBN
10	Program Dukungan Manajemen (Dekon: 059114)	Rp	1,002,084,000	APBN
		Rp	93,369,078,000	

Surabaya, Januari 2022

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR
KHOFIFAH INDAR PARAWANSAPihak Pertama
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**
Ir. HERU SUSENO, M.T.
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 19680530 199503 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. HERU SUSENO, M.T.

Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

Selaku atasan dari Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. HERU SUSENO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680530 199503 1 003

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERSPEKTIF
1	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	1,50%	Proses Bisnis

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 26.819.826.925	P-APBD
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 53.658.854.068	P-APBD
3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2.908.910.500	P-APBD
4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 5.827.145.000	P-APBD
5 Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 650.350.000	P-APBD
6 Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 681.000.000	APBN Ditjen PSP (TP)
7 Program Dukungan Manajemen	Rp 570.560.000	APBN Ditjen PSP (TP)
8 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 4.540.143.000	APBN DitjenBun (TP)
9 Program Dukungan Manajemen	Rp 1.540.500.000	APBN DitjenBun (TP)
10 Program Dukungan Manajemen	Rp 1.002.084.000	APBN DitjenBun (Dekon)
	Rp 98.199.373.493	


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Surabaya, 31 Oktober 2022
**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI JAWA TIMUR**

Ir. HERU SUSENO, M.T.
NIP. 19680530 199503 1 003

NILAI TAMBAH SUB KATEGORI PERKEBUNAN

Rincian	Satuan	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
		Total	Target	Capaian	Total	Target	Capaian	Total	Target	Capaian	Total	Target	Capaian	Total	Target	Capaian	Total		
ADHB	Miliar Rp	37630,2	38.194,65	95,35	36417,62	36.963,88	103,10	38.111,10	38.682,77	102,61	39.692,32	40.287,70	105,25	42.400,80	43.036,81	102,50	44.111,20		
ADHK (2010=100)	Miliar Rp	25834,2			25816,98			26.902,79			26.814,37			27.092,49			27.017,28		
pertumbuhan ADHB	Persen				-3,22	1,50	310,01	4,65	1,50	276,60	4,15	1,50	454,91	6,82	1,50	268,93	4,03		
Kontribusi	Persen				1,66			1,62			1,73			1,73			1,62		
Pertumbuhan yoy	Persen				-0,07			4,21			-0,33			1,04			-0,28		

No	Komoditi	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
I. Tanaman Semusim													
1	Tebu : - Gula Kristal	197.048	1.010.447	184.892	1.067.646	175.632	1.046.856	179.321	985.511	193.515	1.085.865	219.211	1.192.034
2	Tembakau	101.098	99.345	114.490	126.075	121.728	132.648	101.620	115.847	108.829	118.603	88.962	97.936
	Lain-lain	24.123	123.958	21.173	108.243	26.512	145.808	35.661	178.315	19.248	101.929	20.245	103.620
Jumlah I		322.269	1.233.750	320.555	1.301.964	323.872	1.325.312	316.602	1.279.673	321.592	1.306.397	328.418	1.393.590
II. Tanaman Tahunan													
3	Kopi	106.687	64.711	113.124	66.618	113.332	68.114	113.027	68.156	113.329	69.632	113.148	68.916
	- Arabika	22.471	11.972	28.665	13.650	28.867	13.952	28.638	14.489	28.020	14.585	28.124	14.204
	- Robusta	84.216	52.739	84.459	52.968	84.465	54.162	83.818	54.546	85.309	55.047	85.024	54.712
4	Kakao	58.019	33.146	57.526	34.119	57.648	35.285	56.895	35.304	55.430	34.703	54.210	33.002
5	Cengkeh	45.824	10.874	44.443	10.312	44.475	11.658	43.136	10.482	43.255	10.945	43.274	10.716
6	Jambu Mete	47.170	16.208	42.577	16.773	42.356	16.652	38.936	16.825	34.220	16.491	33.105	15.762
7	Kelapa	280.016	253.904	263.347	244.060	261.040	242.520	249.779	240.212	234.078	237.639	232.145	235.020
8	Lain-lain	130.069	76.538	115.590	72.702	115.612	73.426	110.327	75.852	110.608	73.568	109.568	72.415
Jumlah II		667.785	455.381	636.607	444.584	634.463	447.655	611.529	447.710	590.920	442.978	585.450	435.831
JUMLAH TOTAL (I +II)		990.054	1.689.131	957.162	1.746.548	958.335	1.772.967	928.131	1.727.383	912.512	1.749.375	913.868	1.829.421

Cascading Kinerja berdasarkan RPJMD 2019-2024 Perubahan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
Misi 1: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah	Meningkatkan nilai tambah produksi tanaman perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHK)	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	Persentase pertumbuhan PDRB sub kategori perkebunan (ADHB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program Dinas Perkebunan yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran Dinas Perkebunan 3. Indeks profesionalitas ASN 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Predikat Penilaian Implementasi SAKIP
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan 2. Persentase peningkatan benih bersertifikat 3. Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan 4. Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan 5. Persentase peningkatan nilai

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR
						tambah produk perkebunan yang difasilitasi pengolahan hasil
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana on farm 2. Jumlah luas budidaya tanaman perkebunan 3. Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana off farm 4. Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana pengolahan hasil
					Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan 2. Jumlah benih yang diedarkan 3. Jumlah pengawasan mutu benih tanaman perkebunan
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase capaian peningkatan kelas kelompok
					Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang terfasilitasi prasarana perkebunan
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase pengamanan potensi kehilangan produksi tanaman perkebunan
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luas pengendalian 2. Jumlah luas penanggulangan bencana lahan perkebunan
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis yang diberikan
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rekomendasi teknis pengembangan usaha perkebunan 2. Jumlah sertifikat standarisasi produk perkebunan sesuai SNI
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani terakses informasi teknologi Pertanian
					Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Peta proses bisnis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
P.1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	P.1.4	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	P.1.4.5	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan	P.1.4.5.1	Ketersediaan Benih Berkualitas	P.1.4.5.1.1	Penyediaan Benih	P.1.4.5.1.1.1	Optimalisasi pemanfaatan Kebun Sumber Benih Dinas
										P.1.4.5.1.1.2	Pembinaan Penangkar/Produsen Benih
										P.1.4.5.1.1.3	Fasilitasi pengembangan benih unggul
								P.1.4.5.1.2	Sertifikasi Benih	P.1.4.5.1.2.1	Uji Laboratorium
										P.1.4.5.1.2.2	Uji Lapang
										P.1.4.5.1.2.3	Uji Kelayakan calon penangkar/produsen benih
								P.1.4.5.1.3	Pengawasan Peredaran Benih	P.1.4.5.1.3.1	Pelabelan Benih Bersertifikat
										P.1.4.5.1.3.2	Pengawasan Peredaran Benih
										P.1.4.5.1.3.3	Evaluasi kelayakan penangkar/produsen benih
						P.1.4.5.2	Teknik Budidaya Tanaman	P.1.4.5.2.1	Penerapan Budidaya <i>on farm</i>	P.1.4.5.2.1.1	Ekstensifikasi
										P.1.4.5.2.1.2	Rehabilitasi
										P.1.4.5.2.1.3	Intensifikasi
										P.1.4.5.2.1.4	Diversifikasi

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
										P.1.4.5.2.1.5	Peningkatan SDM Budidaya on farm
								P.1.4.5.2.2	Penanganan <i>off farm</i>	P.1.4.5.2.2.1	Peningkatan SDM penanganan panen dan pasca panen
										P.1.4.5.2.2.2	Pemanfaatan teknologi panen dan pasca panen
								P.1.4.5.2.3	Perlindungan Tanaman Perkebunan	P.1.4.5.2.3.1	Peningkatan SDM Pengendalian OPT
										P.1.4.5.2.3.2	Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Tahunan Perkebunan
										P.1.4.5.2.3.3	Konservasi Lahan Perkebunan
										P.1.4.5.2.3.4	Pendampingan Penanganan Pasca Bencana dan Gangguan Usaha Perkebunan
										P.1.4.5.2.3.5	Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Semusim Perkebunan
						P.1.4.5.3	Pengembangan Usaha dan Hilirisasi Produk Tanaman Perkebunan	P.1.4.5.3.1	Pemanfaatan prasarana dan sarana Pengolahan Hasil	P.1.4.5.3.1.1	Peningkatan SDM Pengolahan hasil
										P.1.4.5.3.1.2	Pemanfaatan teknologi pengolahan hasil

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
										P.1.4.5.3.1.3	Pembinaan dan pendampingan Standarisasi Mutu Produk
								P.1.4.5.3.3	Aksesibilitas terhadap Pasar	P.1.4.5.3.3.1	Fasilitasi jalinan kemitraan
										P.1.4.5.3.3.2	Fasilitasi Permodalan
								P.1.4.5.3.4	Penguatan Kelembagaan	P.1.4.5.3.4.1	Peningkatan SDM Manajerial Kelompok Tani
										P.1.4.5.3.4.2	Rintisan Korporasi Petani
								P.1.4.5.3.5	Pembinaan Perkebunan Besar	P.1.4.5.3.5.1	Rekomendasi Teknis Perkebunan Besar
										P.1.4.5.3.5.2	Pendampingan Teknis Perkebunan Besar